

ROAD MAP

PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM)

Gerakan Nasional Pengendalian
Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat



Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim

Gedung Mangala Wanabakti, Blok IV Lt. 6 Wing A
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270 Kotak Pos 6505 Telp/Faks. 021 5747053
Email: proklam.klhk@gmail.com Website: <http://ditjenppi.menlhk.go.id>

 @ProKlim_KLHK  @proklam_klhk



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim

Desember 2017



ROAD MAP
PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM)
GERAKAN NASIONAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
BERBASIS MASYARAKAT

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM
DESEMBER 2017

Road Map Program Kampung Iklim (ProKlim)

Pengarah : Nur Masripatin
Penanggung Jawab : Sri Tantri Arundhati
Penyelaras Akhir : Tri Widayati
Tim Penyusun : Israr Albar, Ade Emilda, Cut Salwitry Tray,
Sugiatmo, Aminah, Hellyta Haska

ISBN: 978-602-74644-4-5

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang menggunakan isi maupun memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, baik dalam bentuk fotocopy, cetak, microfilm, elektronik maupun bentuk lainnya, kecuali untuk keperluan pendidikan atau non-komersial lainnya dengan mencantumkan sumbernya sebagai berikut:

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (2017). Road Map Program Kampung Iklim (ProKlim). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Diterbitkan oleh:

Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim
Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV Lt. 6 Wing A
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270 Kotak Pos 6505
Telp/Faks. 021 5747053

Pencetakan Buku didukung oleh Program SPARC

KATA SAMBUTAN



Upaya pengendalian perubahan iklim yang dilaksanakan secara global, merupakan salah satu agenda prioritas dunia untuk menyelamatkan kehidupan di bumi dan mengamankan keberlanjutan pembangunan nasional. Guna tercapainya target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, seluruh pemangku kepentingan perlu terlibat secara aktif.

Komitmen Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam mengendalikan laju kenaikan suhu bumi harus ditransformasikan menjadi kegiatan bersama para pemangku kepentingan dengan pendekatan yang lebih strategis dan cerdas dari biasanya. Program Kampung Iklim (ProKlim) yang ditetapkan sebagai gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat, merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam membumikan isu global perubahan iklim menjadi aksi bersama di tingkat lokal.

Saya menyambut baik tersusunnya buku Road Map ProKlim sebagai acuan kita bersama menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan berketahanan iklim. Berbagai inisiatif dan *good practises* yang sudah berjalan di lokasi ProKlim memberikan keyakinan bahwa kita bisa melakukan hal-hal baik yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, lingkungan dan pengurangan risiko bencana terkait iklim. Hasil yang sudah dicapai sampai saat ini diharapkan akan menjadi fondasi yang kokoh bagi penguatan pelaksanaan ProKlim selanjutnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,



Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc

KATA PENGANTAR



Program Kampung Iklim (ProKlim) sebagai sebuah gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis komunitas merupakan respon terhadap dampak perubahan iklim yang telah terjadi di tingkat tapak.

ProKlim memuat aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim oleh kelompok masyarakat dalam upaya meningkatkan ketahanan iklim dan mengurangi emisi GRK atau berkontribusi menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°C seperti tertuang dalam Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) pada tahun 2015.

Road Map ProKlim menuangkan kebijakan, gambaran program, pelaksanaan, maupun rencana kedepan dalam rangka mencapai tujuan program di tahun 2030. Konsep ProKlim yang disajikan dalam road map ini merupakan *guidance* bagi pelaksana ProKlim, pendukung, dan pemerintah daerah untuk mengimplementasikannya sesuai dengan landasan peraturan ProKlim.

Road Map ProKlim diharapkan dapat menjadi panduan dalam mengembangkan ProKlim sehingga mampu mendukung pencapaian target nasional. Sinergi dan koordinasi merupakan aspek penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan ProKlim. Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Road Map ProKlim.

Direktur Jenderal,



Dr. Ir. Nur Masripatin, M.For.Sc

DAFTAR ISI

Kata Sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	i
Kata Pengantar Direktur Jenderal	iii
Daftar Isi	v
I. Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan	4
1.3 Landasan Kebijakan dan Peraturan.....	5
II. Mengenal Program Kampung Iklim	9
2.1 Upaya Adaptasi dalam ProKlim	13
2.2 Upaya Mitigasi dalam ProKlim	14
2.3 Kelembagaan dan Dukungan Keberlanjutan.....	16
III. Pelaksanaan ProKlim.....	18
3.1 Periode Pelaksanaan 2012-2017.....	18
3.2 Penguatan Kelembagaan	26
3.3 ProKlim dalam SRN.....	27
3.4 Komunitas ProKlim.....	30
3.5 Sinergitas ProKlim	31
IV. Arah Kebijakan Penguatan Pelaksanaan ProKlim.....	38
V. Penutup	49

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia. Hal ini dapat diamati dengan adanya perubahan pola, intensitas atau pergeseran parameter utama iklim seperti curah hujan, suhu, kelembaban, angin, tutupan awan dan penguapan. Perubahan iklim berdampak pada ekosistem dan manusia di seluruh bagian benua dan samudera di dunia. Perubahan iklim dapat menimbulkan risiko besar bagi kesehatan manusia, keamanan pangan, dan pembangunan ekonomi.

Data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa suhu rata-rata Indonesia pada tahun 2016 lebih tinggi 1,2 derajat celsius dibandingkan normalnya yaitu berdasarkan suhu rata-rata Tahun 1981-2000. Hal ini melampaui rata-rata anomali suhu tahun 2015, yaitu sebesar 1 derajat celsius dibandingkan normalnya. Sejalan dengan hal tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah melaporkan bahwa terjadi kecenderungan kenaikan kejadian bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan puting beliung. Kejadian bencana hidrometeorologi yang diperparah dengan faktor antropogenik terus meningkat dari tahun ke tahun, dimana saat ini tercatat mencapai 98 persen dari seluruh kejadian bencana di Indonesia.

Dengan kondisi tersebut maka upaya adaptasi dan mitigasi menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan guna menghindari bencana dan kerugian yang lebih parah akibat terjadinya perubahan iklim. Adaptasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat

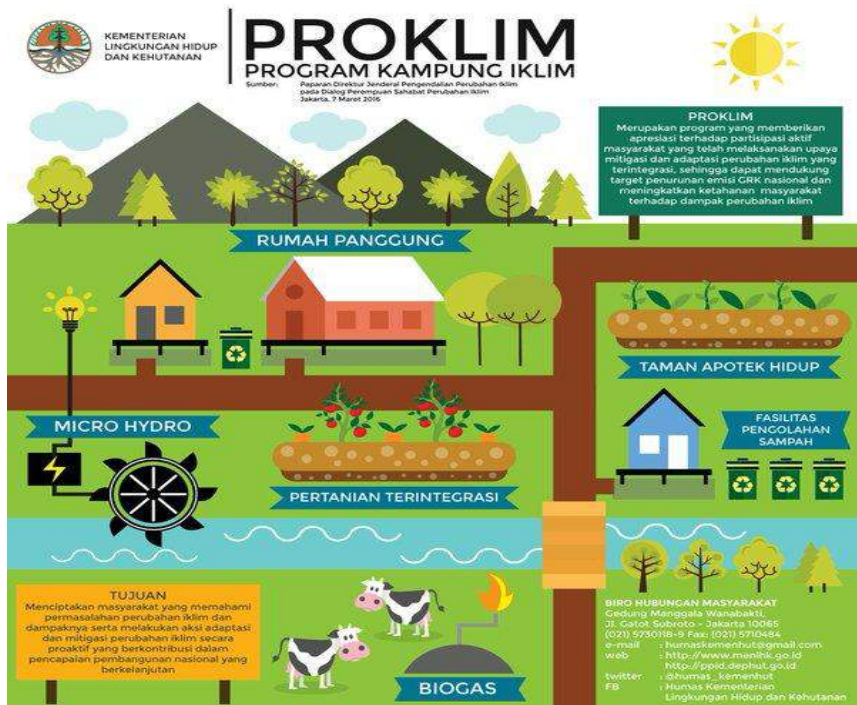
dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi. Mitigasi perubahan iklim adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Upaya adaptasi dan mitigasi merupakan paket utuh pengendalian perubahan iklim yang harus dilaksanakan secara bersama-sama untuk meminimalkan risiko yang mungkin terjadi.

Indonesia bersama dengan negara-negara lain di dunia telah menetapkan komitmen untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global tidak lebih dari 2°C, di atas tingkat pada masa pra industrialisasi, dengan ambisi lebih lanjut untuk menekan kenaikan suhu sebesar 1,5°C seperti tertuang dalam Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) yang disahkan di Paris pada tahun 2015. Kesepakatan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan aksi nyata yang melibatkan seluruh elemen para pemangku kepentingan. Ditegaskan dalam Kesepakatan Paris bahwa gaya hidup dan pola konsumsi-produksi berkelanjutan memegang peranan penting dalam penanganan perubahan iklim.

Dalam salah satu keputusan 1/CP-21 UNFCCC terkait dengan *non-Party Stakeholders (NPS)*, tercantum bahwa masyarakat, sektor swasta, lembaga keuangan, dan pemerintah daerah diminta meningkatkan upaya dan dukungan aksi untuk mengurangi emisi serta membangun ketahanan dan mengurangi kerentanan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Pelibatan *non-party stakeholders*, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat umum secara terus menerus menjadi komitmen Pemerintah Indonesia sebagaimana tercantum dalam dokumen NDC yang telah disampaikan kepada Sekretariat UNFCCC pada tahun 2016.

Salah satu strategi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam upaya pengendalian perubahan iklim adalah dengan mendorong kerjasama multi-pihak untuk memperkuat kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak berbasis komunitas melalui pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim).

Dalam Pasal 70, UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat dapat berperan aktif dengan cara meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, menumbuh kembangkan ketanggap-segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, serta mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kelangsungan kehidupan di bumi.



Gambar 1. Konsep Program Kampung Iklim (ProKlim)

ProKlim merupakan kegiatan yang memadukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada tingkat tapak dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat dan berbagai pihak pendukung seperti pemerintah dan pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi serta lembaga non-pemerintah. Pelibatan para pemangku kepentingan yang efektif serta pengelolaan pengetahuan adaptasi dan mitigasi perubahan di tingkat tapak merupakan salah satu aspek penting untuk mencapai target pengendalian perubahan iklim di tingkat nasional maupun global.

Pengembangan ProKlim dilaksanakan selaras dengan implementasi strategi kebijakan pembangunan perdesaan tahun 2015-2019, yaitu untuk mendukung terwujudnya kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi tepat guna di perdesaan. Selain itu pelaksanaan ProKlim juga memperkuat pengembangan kota ramah lingkungan yang resilien terhadap perubahan iklim dan berkelanjutan, dengan memperhatikan keseimbangan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. ProKlim dapat diterapkan baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan untuk membangun masyarakat yang lebih tahan dalam menghadapi perubahan iklim serta memiliki pola hidup rendah emisi karbon.

1.2 TUJUAN

Road map ProKlim merupakan rencana rinci yang memuat tahapan sistematis guna memberikan arah dan acuan bagi semua pihak baik pelaksana, pemerintah dan pendukung dalam pengembangan lebih lanjut dan pelaksanaan ProKlim secara nasional untuk periode waktu sampai dengan tahun 2030.

Road map menjadi instrumen yang akan memandu rencana tahapan perubahan pelaksanaan ProKlim, bersinergi dengan berbagai kegiatan

terkait sehingga dapat memberikan gambaran titik awal dan akhir suatu perubahan akan dilakukan dalam rangka mensukseskan target capaian program secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya road map maka diharapkan ProKlim dapat diperkuat pelaksanaannya secara sistematis dan terarah dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia serta memaksimalkan kolaborasi multi pihak dalam merealisasikan rencana kegiatan di setiap periode waktu sesuai tahapan yang direncanakan.

Road map ProKlim menjabarkan langkah-langkah kebijakan nasional dalam meningkatkan ketahanan iklim masyarakat di tingkat lokal, baik pada periode pra-2020 maupun pasca-2020 sampai tahun 2030, sehingga kemudian dapat dihitung kontribusinya terhadap pencapaian penurunan emisi GRK.

1.3 LANDASAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri LHK No. P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis KLHK Tahun 2015-2019, program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DJPPi) dalam periode ini secara garis besar diarahkan pada: 1) Meningkatnya efektifitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; 2) Menurunnya luas areal kebakaran hutan dan lahan; dan 3) Meningkatnya wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi perubahan iklim. Fasilitasi desa/kelurahan yang menerapkan Program Kampung Iklim (ProKlim) ditetapkan sebagai salah satu indikator capaian sasaran peningkatan wilayah yang memiliki kapasitas adaptasi dengan target sebanyak 2.000 desa/kelurahan, yang sekaligus juga dapat berkontribusi terhadap pencapaian sasaran peningkatan efektifitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak.

Sejak diluncurkan pada tahun 2011, ProKlim telah memiliki payung hukum pelaksanaan berupa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim. Integrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan pada tahun 2015, diikuti dengan pengesahan peraturan pengganti melalui Peraturan Menteri LHK No P.84/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim. Untuk memberikan arahan teknis kepada semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam ProKlim, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim kemudian menerbitkan Peraturan Dirjen PPI No. P.1/PPI/SET/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim. Secara garis besar Perdirjen tersebut memuat hal-hal teknis mengenai (1) Informasi Umum ProKlim, (2) Pedoman Pembentukan dan Pengembangan ProKlim (3) Pedoman Pengusulan ProKlim (4) Pedoman Penilaian ProKlim dan (5) Pedoman Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan ProKlim yang memberikan panduan bagi pemerintah, pendukung dan pelaksana ProKlim. Sedangkan untuk pedoman penghitungan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam pelaksanaan aksi mitigasi di lokasi ProKlim, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal PPI No. P.5/PPI/SET/KUM.1/12/2017 tentang Pedoman Penghitungan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat.

Pelaksanaan ProKlim pada periode tahun 2015-2019 diarahkan untuk sejalan dengan Nawa Cita yang merupakan aksi prioritas pembangunan nasional, terutama dalam hal membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, serta meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Penetapan komitmen nasional menuju arah pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sebagai satu prioritas yang terintegrasi dan lintas-

sektoral dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, diterjemahkan menjadi program di tingkat tapak melalui pelaksanaan ProKlim yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan elemen NPS lainnya. Peran strategis ProKlim diperkuat dengan kebijakan KLHK untuk menjadikan ProKlim sebagai gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis komunitas pada tahun 2016.

Kebijakan transisi Indonesia menuju masa depan yang rendah emisi dan berketahanan iklim yang diuraikan dalam dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia, mencakup juga penegasan penguatan peran ProKlim sebagai program ketahanan iklim di tingkat lokal. Peningkatan aksi dan kondisi yang mendukung selama periode 2015-2019, diharapkan akan menjadi landasan kuat untuk merealisasikan tujuan lebih ambisius pada periode Tahun 2020-2030.

Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam ProKlim merupakan konsep pengendalian perubahan iklim tingkat tapak yang terintegrasi, terutama untuk membangun ketahanan sumber daya pangan, air dan energi dengan memperhitungkan risiko perubahan iklim jangka panjang maupun kejadian bencana terkait hidrometeorologi yang semakin sering terjadi dalam skala yang semakin luas.

Pendekatan strategis NDC Indonesia yang didasarkan antara lain pada prinsip menyoroti *best practices* dan pengarusutamaan agenda perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan juga menjadi rujukan dalam pelaksanaan ProKlim. Rangkaian kegiatan ProKlim dikembangkan untuk dapat memfasilitasi pengumpulan data dan informasi mengenai upaya multi-sektor, kearifan tradisional dan inovasi aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat dan berbagai pihak terkait lainnya.

Data yang terkumpul diharapkan dapat menjadi umpan balik perencanaan pembangunan secara berjenjang, mulai dari pembangunan tingkat desa sampai skala nasional, yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan rendah emisi karbon.

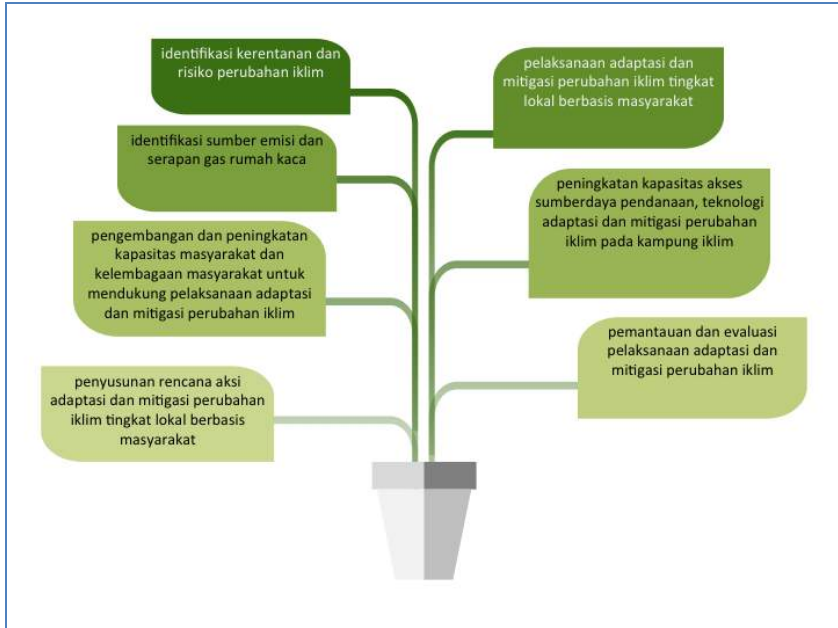
II. MENGENAL PROGRAM KAMPUNG IKLIM

Perubahan iklim merupakan suatu keniscayaan yang harus dihadapi dengan melakukan antisipasi sedini mungkin melalui aksi nyata di tingkat lokal yang dapat berkontribusi langsung maupun tidak langsung dalam mengendalikan laju kenaikan suhu permukaan bumi agar tidak lebih dari 2^oC, serta langkah-langkah penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi akibat meningkatnya suhu permukaan bumi.

Program Kampung Iklim (ProKlim) merupakan program berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi di masing-masing wilayah.

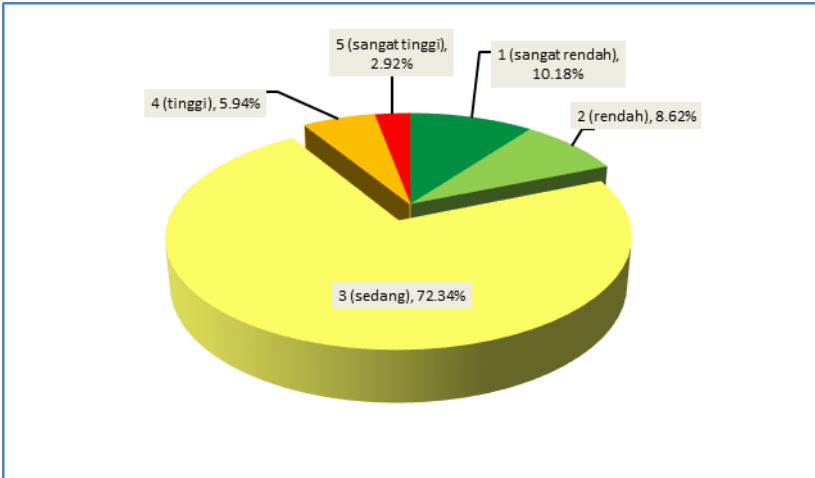
Kampung Iklim adalah lokasi yang berada di wilayah administratif paling rendah setingkat rukun warga atau dusun dan paling tinggi setingkat kelurahan atau desa, atau wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkesinambungan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.84/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang ProKlim, ruang lingkup pelaksanaan ProKlim mencakup kegiatan sebagaimana digambarkan dalam diagram pada Gambar 2.



Gambar 2. Ruang Lingkup Program Kampung Iklim

Penerapan ProKlim sebagai gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis komunitas didorong untuk dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan risiko yang dihadapi masyarakat di masa depan dengan terjadinya perubahan iklim. Pemahaman mengenai tingkat kerentanan, potensi dampak dan proyeksi iklim dengan bertambahnya suhu permukaan bumi perlu dibangun, sehingga masyarakat mampu memilih jenis aksi adaptasi yang diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dalam menghadapi perubahan iklim. Berdasarkan data dan informasi kerentanan perubahan iklim yang termuat dalam Sistem Informasi Data Indek Kerentanan (SIDIK) yang dikembangkan oleh KLHK, desa di Indonesia sebagian besar memiliki indeks kerentanan sedang sampai sangat tinggi seperti terlihat dalam diagram pada gambar 3 berikut.



Gambar 3. Indeks Kerentanan Desa di Indonesia (Data PODES 2014)

Penguatan aksi adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak melalui ProKlim sangat diperlukan terutama pada daerah yang teridentifikasi rentan terhadap dampak perubahan iklim. Pada saat kerentanan dapat diatasi dengan upaya peningkatan kapasitas adaptasi, yang kemudian menjadi hal yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat, maka masyarakat tersebut dapat dikatakan memiliki ketahanan (resiliensi) terhadap perubahan iklim. Resiliensi adalah kemampuan dalam mengatasi dampak perubahan iklim untuk mempertahankan dan meningkatkan fungsi esensial, identitas, struktur, dan kapasitasnya. Ketahanan dapat didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk menolak, menyerap, dan pulih dari efek bahaya secara tepat waktu dan secara efisien, menjaga atau pemulihan pengutamakan struktur dasar, fungsi dan identitas. Ketahanan adalah konsep yang semakin banyak dibahas di bidang adaptasi. Sebuah komunitas yang tangguh ditempatkan untuk mengelola bahaya untuk meminimalkan efek dan/atau untuk memulihkan dengan cepat dari setiap dampak negatif yang terjadi.

Sejalan dengan hal tersebut, masyarakat juga perlu memahami sumber emisi GRK yang ada di lingkungan sekitarnya, merancang aksi lokal yang dapat dilaksanakan dan menerapkan pola hidup rendah karbon sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi GRK. Pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal dapat dilaksanakan tahap demi tahap, sesuai kondisi di wilayah setempat, skala prioritas masyarakat dan adanya aspek pendukung yang menjamin kegiatan dilaksanakan secara berkesinambungan.

ProKlim menerapkan konsep pemberdayaan masyarakat (*Community Based Development*), dimana kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat beserta institusinya dalam memobilisasi dan mengelola sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam di dalam desa maupun yang berasal dari luar desa diarahkan untuk memperkuat upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.

Pinsip pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan ProKlim adalah berbasis masyarakat (*community based*), berbasis sumber daya setempat (*local resource based*) dan berkelanjutan (*sustainable*). Kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan (*empowerment*) agar anggota masyarakat dapat ikut dalam proses yang berlangsung atau institusi penunjang dalam proses produksi, kesetaraan (*equity*) dengan tidak membedakan status dan keahlian, keamanan (*security*), keberlanjutan (*sustainability*) dan kerjasama (*cooperation*), yang semuanya berjalan secara simultan.

Secara konseptual, suatu kampung iklim terdiri dari masyarakat dan lingkungannya yang diharapkan memiliki ketahanan terhadap perubahan iklim yang sedang dan akan berlangsung. Guna meningkatkan ketahanan tersebut, maka suatu kampung iklim seyogyanya mempunyai upaya-upaya dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sehingga dampak akibat perubahan iklim dapat diminimalisir sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca pada skala tapak.



Gambar 4. Komponen Kegiatan ProKlim

ProKlim diarahkan sebagai instrumen pengumpulan data dan informasi mengenai *good practises* di tingkat masyarakat yang berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Data dan informasi yang terkumpul dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan seluruh pihak terkait (termasuk dunia usaha) untuk mengembangkan kebijakan dan program/kegiatan penguatan aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

2.1 UPAYA ADAPTASI DALAM PROKLIM

Kegiatan yang terkait dengan upaya adaptasi merupakan upaya masyarakat dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim yang tidak dapat dielakkan.



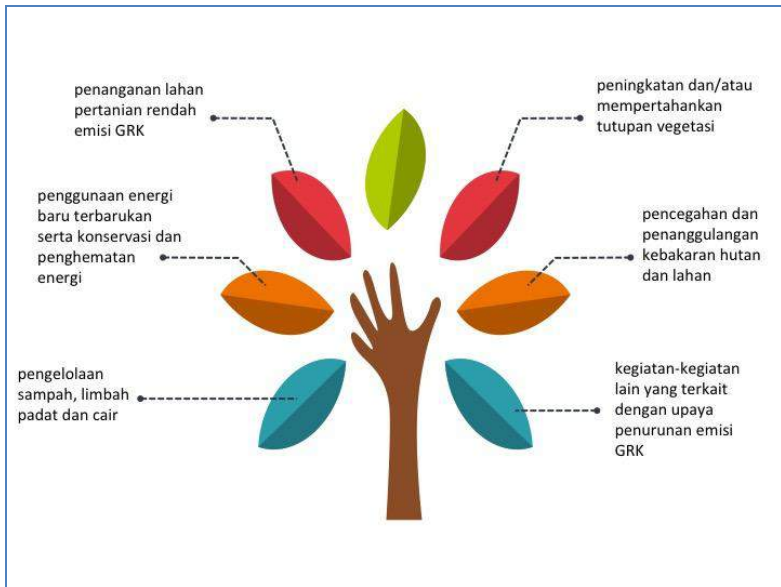
Gambar 5. Komponen Adaptasi pada ProKlim

Sebagaimana pada Gambar 5 diatas, upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dapat dilaksanakan melalui kegiatan antara lain: (a) Pengendalian kekeringan, banjir dan longsor; (b) Peningkatan ketahanan pangan; (c) Penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, ablasi atau erosi akibat angin, gelombang tinggi; (d) Pengendalian penyakit terkait iklim; dan (e) kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan upaya peningkatan penyesuaian diri terhadap perubahan iklim.

2.2 UPAYA MITIGASI DALAM PROKLIM

Kegiatan yang terkait dengan upaya mitigasi perubahan iklim sesungguhnya telah banyak dilaksanakan pada lokasi-lokasi yang memiliki kearifan lokal yang tinggi, seperti yang masih berjalan pada

beberapa daerah di Maluku, Papua, Bali dan Jawa. Pada dasarnya upaya mitigasi merupakan kegiatan pencegahan penyebab perubahan iklim sekaligus mengurangi peningkatan emisi gas rumah kaca ke atmosfer.

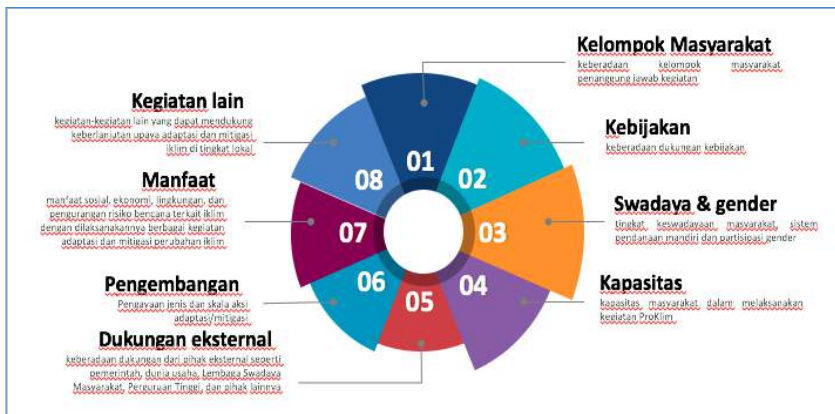


Gambar 6. Komponen Mitigasi dalam ProKlim

Kegiatan mitigasi di tingkat tapak dapat dimulai dari hal-hal sederhana di lingkungan sekitar rumah sampai dengan yang dilaksanakan secara berkelompok dengan melibatkan warga di lokasi kampung iklim. Perilaku hemat energi, transportasi hijau, pengelolaan sampah, penanaman pohon serta pengendalian kebakaran lahan dan hutan yang melibatkan masyarakat adalah contoh kegiatan mitigasi di tingkat tapak yang perlu terus dikampanyekan kepada seluruh pihak.

2.3 KELEMBAGAAN DAN DUKUNGAN KEBERLANJUTAN

Pelaksanaan ProKlim mengedepankan aspek keberlanjutan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak. Masyarakat didorong untuk terlibat dalam setiap tahap pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan kegiatan pada lokasi kampung iklim. Melalui pendekatan ini komitmen dan motivasi masyarakat akan meningkat, serta memperkuat rasa kepemilikan terhadap program/kegiatan yang berjalan. Mempertimbangkan pentingnya hal tersebut, maka komponen kelembagaan dan dukungan keberlanjutan seperti yang diuraikan dalam gambar 7 dibawah ini mempunyai bobot 40% dari total penilaian pada saat dilakukan evaluasi pengusulan ProKlim.



Gambar 7. Kelembagaan dan Dukungan Keberlanjutan ProKlim

ProKlim merupakan kegiatan berbasis komunitas pada tingkat tapak yang berkelanjutan sehingga penguatan kelembagaan merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan ProKlim. Kelompok masyarakat yang terdapat pada lokasi ProKlim merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi di tingkat tapak.

Kelembagaan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ProKlim tidak hanya kelembagaan tingkat tapak, namun juga kelembagaan yang terdapat di tingkat kabupaten/kota/provinsi (Dinas Lingkungan Hidup) hingga Pemerintah (KLHK) termasuk unit pelaksana teknis yang secara langsung bertanggungjawab dalam ProKlim. Hal lain yang menjadi penilaian terkait aspek dukungan keberlanjutan misalnya seperti tingkat keswadayaan masyarakat, kemampuan untuk membangun jejaring kerja dengan pihak eksternal yang dapat mendukung keberlanjutan program, dan penerapan nilai-nilai tradisional yang mendukung upaya adaptasi/mitigasi perubahan iklim.

III. PELAKSANAAN PROKLIM

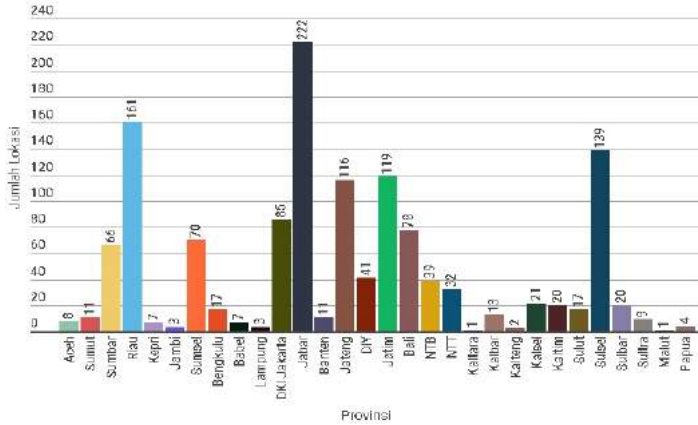
3.1. PERIODE PELAKSANAAN 2012-2017

Program Kampung Iklim yang diluncurkan pertama kali tahun 2011 telah berkembang dan mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak. ProKlim berfungsi sebagai instrumen pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat dalam menjembatani komunikasi dan pertukaran informasi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kelompok terkecil di tingkat masyarakat, pengurus desa/kelurahan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dan Provinsi, hingga Kementerian/Lembaga di tingkat nasional, serta melibatkan juga peran aktif dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah. Di beberapa provinsi dan kabupaten/kota, Gubernur atau Bupati/Walikota telah menerbitkan kebijakan atau peraturan lokal sebagai dasar pelaksanaan ProKlim di daerah. Hingga tahun 2017 tercatat sebanyak 1.375 lokasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia telah diusulkan sebagai kampung iklim, sebagaimana terlihat dalam Gambar 8.



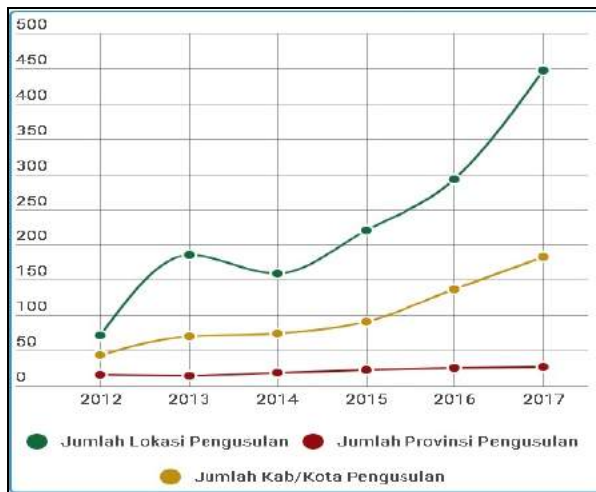
Gambar 8. Peta Sebaran Pengusulan Lokasi ProKlim 2012-2017

Total pengusulan ProKlim di masing-masing daerah selama periode tahun 2012-2017 menggambarkan tingkat partisipasi daerah dalam pelaksanaan ProKlim yang dapat dilihat dalam grafik pada Gambar 9.



Gambar 9. Tingkat Pengusulan ProKlim 2012-2017

Jumlah Kabupaten/Kota yang mengikuti kegiatan ProKlim menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, terutama pada periode waktu 3 tahun terakhir yaitu tahun 2015-2017, seperti terlihat dalam grafik pada Gambar 10.



Gambar 10. Tren Pengusulan ProKlim Tahun 2012-2017

Pengusulan lokasi ProKlim dilakukan oleh berbagai pihak yang mempunyai informasi mengenai kegiatan yang dapat mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan telah berjalan dengan baik pada lokasi tertentu. Lokasi yang didaftarkan sebagai kampung iklim dievaluasi dengan meninjau aspek keragaman aksi adaptasi, mitigasi, serta kelembagaan dan dukungan keberlanjutan yang ada di lokasi tersebut melalui kegiatan verifikasi lapangan dengan tahapan seperti terlihat pada Gambar 11 berikut.



Gambar 11. Verifikasi Pengusulan ProKlim

Verifikasi lapangan dimaksudkan untuk melihat kesesuaian data pengusulan ProKlim dan kondisi sesungguhnya di lapangan. Sejak tahun 2017, kegiatan verifikasi lapangan diprioritaskan pada lokasi yang teridentifikasi dapat memenuhi kriteria/persyaratan untuk memperoleh penghargaan ProKlim Utama dan Lestari.

Lokasi yang telah mendapat penghargaan diharapkan menjadi model penerapan ProKlim di berbagai wilayah dengan karakteristik beragam serta dapat memperlihatkan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga daerah lain kemudian terdorong untuk mengembangkan kampung iklim. Tokoh penggerak ProKlim bersama-sama dengan warga setempat berperan sebagai agen pembawa perubahan untuk menularkan kegiatan baik yang telah dilaksanakan dan memperkaya aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada tingkat tapak dapat dimulai dari kegiatan sederhana yang dilakukan secara individual maupun kelompok. Data yang terkumpul melalui pelaksanaan ProKlim memperlihatkan bahwa kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dapat dikembangkan dari kegiatan baik yang telah dilaksanakan oleh masyarakat dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah dibangun di lokasi setempat yang dapat berkontribusi terhadap upaya pengendalian perubahan iklim dengan contoh seperti terlihat pada Gambar 14.



Gambar 14. Contoh Kegiatan ProKlim

Kontribusi aksi di tingkat tapak terhadap pengurangan emisi GRK dapat dihitung dengan metoda perhitungan sesuai pedoman yang disusun oleh KLHK. Beberapa contoh hasil uji coba perhitungan penurunan emisi GRK berdasarkan kegiatan pemantauan yang dilaksanakan oleh tim Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim, KLHK, di beberapa lokasi disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Contoh Hasil Perhitungan Emisi GRK Tingkat Tapak

Lokasi	Penurunan Emisi GRK (Ton CO ₂ e)			
	Energi	Kehutanan	Pertanian	Peternakan
Jorong Labuan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat	-	226,1	79,28	0,23
Jorong Pinang Sinawa, Kabupaten Solok, Sumatera Barat	-	415,6	0,05	0,23
Desa Gunung Sari, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung	-	6,56	-	0,63

Pelaksanaan ProKlim pada periode tahun 2012-2017 secara garis besar meliputi kegiatan berikut:

a. Sosialisasi ProKlim

Sosialisasi ProKlim merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan secara terus menerus. Pada dasarnya kegiatan ini terdiri dari penyampaian informasi mengenai substansi perubahan iklim dan peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum formal pelaksanaan ProKlim.

Selain sosialisasi yang dilakukan oleh KLHK, kegiatan sosialisasi juga dilaksanakan oleh dinas yang membidangi lingkungan hidup di provinsi ataupun kabupaten/kota. Beberapa daerah yang telah

berinisiatif melaksanakan kegiatan sosialisasi/pembinaan teknis kepada pemangku kepentingan di wilayah setempat, antara lain seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan. Pada tingkat kabupaten/kota, Pemerintah daerah yang melaksanakan sosialisasi antara lain di Kota Semarang, Kota Sukabumi, Kota Palembang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Bandung. Kegiatan sosialisasi juga dilaksanakan oleh perusahaan kepada desa/kampung yang menjadi lokasi binaannya.

Melalui sosialisasi, masyarakat dapat memahami pentingnya kegiatan ProKlim dan diharapkan semakin banyak lokasi yang melakukan aksi adaptasi dan mitigasi pada tingkat tapak sehingga kemudian dapat diusulkan dan didaftarkan sebagai lokasi ProKlim.



Gambar 15. Sosialisasi dan Kampung ProKlim oleh Pemerintah Daerah

b. Bimbingan Teknis

Lokasi ProKlim didaftarkan berdasarkan usulan berbagai pihak, baik perseorangan ataupun lembaga sebagai penanggungjawab

kegiatan. Pendaftaran lokasi ProKlim sejak tahun 2017 dilakukan melalui portal Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau SRN dengan alamat <http://ditjenppi.menlhk.go.id/srn>. Untuk melakukan pendaftaran, hal pertama yang mesti dilakukan adalah mengisi formulir di laman website SRN guna memperoleh akses pendaftaran SRN.

Untuk memberikan pemahaman dan pengertian dalam pendaftaran ProKlim melalui SRN, dilaksanakan bimbingan teknis pendaftaran dan pengisian informasi umum lokasi dan informasi teknis yang diperlukan. Selain itu dilaksanakan juga kegiatan peningkatan kapasitas verifikator ProKlim dan pengayaan muatan teknis tokoh penggerak masyarakat di beberapa daerah untuk lebih mendorong replikasi ProKlim.

Bimbingan teknis diberikan baik lingkup internal Ditjen PPI termasuk UPT Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (PPIKHL) maupun kepada dinas yang membidangi lingkungan hidup tingkat provinsi/kabupaten/kota sebagai mitra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Gambar 16. Penyelenggaraan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Daerah (2015-2017)

3.2 PENGUATAN KELEMBAGAAN

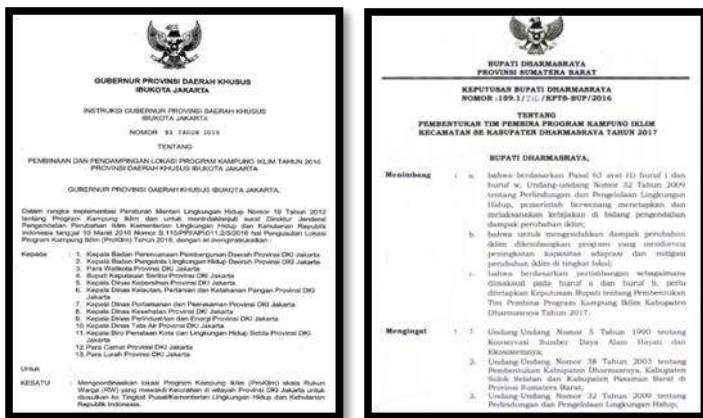
Pembangunan dan pengembangan ProKlim merupakan tanggungjawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Secara institusi, Kementerian LHK merupakan penanggungjawab ProKlim secara nasional.

Dengan terbit dan berlakunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016, Direktorat Jenderal PPI memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan (BPPIKHL) yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas daerah dalam kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) di daerah, serta evaluasi dan pelaporan rencana aksi di daerah dalam penurunan Gas Rumah Kaca. Dalam pelaksanaan ProKlim, personil teknis BPPIKHL berperan sebagai verifikator dalam pengecekan kesesuaian data pengusulan ProKlim di lapangan.



Gambar 17. Pencanangan ProKlim di Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Riau

Pelaksanaan ProKlim di daerah diperkuat dengan penerbitan peraturan pelaksana tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Beberapa pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan pelaksana ProKlim untuk wilayah setempat dan mendapat apresiasi mendukung ProKlim tahun 2016 dan 2017 seperti tercantum dalam Lampiran 2. Hal ini menunjuk adanya dukungan kuat pemerintah daerah terhadap pelaksanaan ProKlim. Kepala daerah membentuk gugus tugas lintas sektor untuk memfasilitasi pengembangan dan pelaksanaan ProKlim di wilayah setempat.



Gambar 18. Contoh Dasar Pelaksanaan ProKlim di Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Dharmasraya

3.3 PROKLIM DALAM SRN

Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau SRN merupakan sistem pengelolaan dan penyediaan data dan informasi berbasis web tentang aksi dan sumber daya untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Dalam kaitannya dengan ProKlim, SRN merupakan portal untuk pendaftaran ProKlim mulai tahun 2017. SRN menjadi wadah pengelolaan data dan informasi aksi

dan sumber daya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Hal ini memungkinkan terwujudnya standarisasi dan integrasi data maupun informasi sehingga mengurangi permasalahan data yang selama ini terjadi seperti tingkat akurasi data yang rendah, redundansi, ketidakmutakhiran dan inkonsistensi data.

Seiring dengan upaya pengarusutamaan isu perubahan iklim di tingkat kebijakan pemerintah, aksi pengendalian perubahan iklim telah pula diinisiasi oleh berbagai pihak. Ditingkat tapak, masyarakat turut berkontribusi dalam mengurangi dampak perubahan iklim baik melalui inisiatif mandiri maupun pendampingan mitra. Melalui SRN inilah, data dan informasi dari aksi maupun sumber daya yang digunakan tersebut dihimpun secara kolektif. SRN merupakan bentuk pengakuan pemerintah atas kontribusi para pihak dalam upaya pengendalian perubahan iklim di Indonesia.



Gambar 19. ProKlim Tahun 2017 dalam SRN

Informasi umum dan teknis yang didaftarkan oleh pengusul (proponen) melalui portal SRN, perlu divalidasi untuk mencermati apakah suatu usulan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Secara garis besar validasi dilakukan terhadap data umum dan data teknis yang disampaikan oleh pengusul ProKlim. Validasi dilakukan oleh Sekretariat ProKlim dengan melakukan pengecekan pada data yang terdapat di SRN.

Berdasarkan hasil validasi tersebut, selanjutnya dilakukan proses verifikasi lapangan untuk lokasi usulan ProKlim yang memenuhi ambang batas skor sesuai ketentuan berlaku. Dengan demikian, verifikasi merupakan proses pemeriksaan kesesuaian informasi yang disampaikan dalam dokumen pengusulan ProKlim dengan kondisi eksisting di lapangan. Tujuan verifikasi adalah sebagai berikut :

- (1) Melakukan pemeriksaan kesesuaian informasi yang disampaikan dalam dokumen pengusulan ProKlim dan pengecekan fisik bentuk-bentuk kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di lapangan, serta mencatat dan melaporkan pengamatan di lapangan, baik secara kualitas dan kuantitas;
- (2) Mengidentifikasi kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang ditemukan di lapangan yang belum dimasukkan ke dalam Lembar Pengusulan Lokasi ProKlim; dan
- (3) Mengidentifikasi potensi lokal untuk memberikan usulan rekomendasi pengembangan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Hasil validasi akhir berupa nilai skor sebagai dasar pengelompokan kategori ProKlim. Sesuai peraturan yang berlaku, lokasi ProKlim dapat dibagi menjadi 4 kelas yaitu Pratama, Madya, Utama, dan Lestari. Bagi penerima penghargaan ProKlim Utama yang telah berhasil mereplikasi kegiatan baiknya ke lokasi lain, maka dapat menerima apresiasi ProKlim Lestari.



Gambar 20. Kategori ProKlim

3.4 KOMUNITAS PROKLIM

ProKlim yang dikembangkan sejak tahun 2011 dan mulai dilaksanakan di tahun 2012 mendapat respon positif dari masyarakat, kelompok masyarakat, pegiat lingkungan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan hingga pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Hal ini tercermin dari aktifnya komunitas dalam melakukan upaya adaptasi dan mitigasi pada tingkat tapak dan memperkuat aspek keberlanjutan baik oleh kelompok masyarakat, LSM dan perusahaan.



Gambar 21. Contoh Kegiatan Komunitas ProKlim di Kabupaten Cirebon, Bangkalan dan Rokan Hilir.

3.5 SINERGITAS PROKLIM

Melalui Peraturan Menteri LHK No. P.83/MenLHK/Setjen/ Kum.1/2016 telah diatur tentang Perhutanan Sosial, yang merupakan suatu sistem pengelolaan hutan lestari yang berlokasi dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat, yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Hutan Desa (HD) merupakan kegiatan yang dilaksanakan di dalam kawasan hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dilaksanakan di hutan negara oleh kelompok tani. Program Hutan Kemasyarakatan lebih ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat. Skema Perhutanan Sosial lainnya adalah melalui Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang dikelola di hutan produksi, dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan pola tanam silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan dijalin melalui skema Kemitraan Kehutanan.

Skema Perhutanan Sosial bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pengelolaan/pemanfaatan kawasan hutan melalui upaya pemberian akses legal kepada masyarakat setempat. Perhutanan Sosial juga dimaksudkan untuk menekan konflik tenurial yang kerap terjadi dalam kawasan hutan. Disamping bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kelestarian sumber daya hutan,

melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat di dalam maupun di sekitar hutan.

Desa binaan lingkup Kementerian LHK lainnya adalah Desa Konservasi. Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P.43/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam disebutkan bahwa Desa Konservasi adalah desa atau sebutan lain yang berada di sekitar KSA/KPA dan ditunjuk/ditetapkan oleh Pengelola KSA/KPA sebagai sasaran Pemberdayaan Masyarakat. Akses yang diberikan untuk masyarakat Desa Konservasi yaitu pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti getah, rumput, rotan, madu, tumbuhan obat, jamur dan buah-buahan; budidaya tradisional; perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi; pemanfaatan sumber daya perairan terbatas untuk jenis-jenis yang tidak dilindungi atau wisata alam terbatas.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) ditugaskan mengalokasikan areal kawasan hutan seluas 12,7 juta ha untuk kegiatan Perhutanan Sosial dengan melibatkan masyarakat melalui Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat dan Hutan Rakyat/Kemitraan. Realisasi luas areal Perhutanan Sosial nasional (HD, HKm dan HTR) sampai dengan September 2017 adalah seluas 983.389,91 Ha yang tersebar di 333 lokasi (Data Dit. PKPS).

Guna tercapainya target fasilitasi ProKlim yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019, dipandang perlu untuk melakukan terobosan-terobosan agar target di tahun 2019 dapat terealisasi, salah satunya adalah melalui sinergitas ProKlim dengan Perhutanan Sosial (HD, HKm dan HTR). Sinergitas tersebut dapat dilaksanakan mengingat sasaran utama kegiatan adalah masyarakat dengan tujuan utama program/kegiatan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat,

peningkatan kelestarian sumberdaya hutan yang memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dan kualitas lingkungan. Kelompok masyarakat (termasuk kelompok tani hutan atau gabungan kelompok tani hutan) yang berfungsi sebagai pendukung keberlanjutan pelaksanaan ProKlim juga dapat mengelola HKm dan HTR, sedangkan lembaga desa sebagai lembaga dalam satuan administratif desa (yang berada dalam cakupan wilayah ProKlim) dapat mengelola HD. Aksi nyata yang umum diterapkan dalam kedua program tersebut merupakan kegiatan yang berkaitan dengan konservasi tanah dan air yang disinergikan dengan kearifan lokal. Selain itu, kegiatan peningkatan dan/atau mempertahankan tutupan vegetasi melalui penghijauan dan praktek wanatani yang merupakan indikator dalam ProKlim (mitigasi perubahan iklim).

Mengingat lokasi ProKlim cenderung berada di pusat permukiman penduduk, maka pilihan pilihan skema yang dapat diterapkan dalam upaya sinergitas program tersebut adalah upaya untuk memacu agar lokasi Perhutanan Sosial ataupun Desa Konservasi yang sudah terbina dengan baik dapat terdaftar sebagai Kampung Iklim. Hal ini dapat dilaksanakan pada skema HD karena lokasi tersebut berada dalam satu wilayah administrasi desa.

Selain skema desa binaan tersebut di atas, terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang dapat bersinergi dengan ProKlim, diantara adalah Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Manggala Agni (MA).

Masyarakat Peduli Api (MPA) adalah masyarakat yang sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih/diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu kegiatan pengendalian kebakaran hutan. Penetapan MPA didahului dengan penetapan desa sasaran, meliputi desa yang berbatasan dengan kawasan hutan, rawan kebakaran lahan dan berpotensi meluas ke hutan dan atau yang ditetapkan oleh kepala unit atau

Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai desa sasaran. Setiap organisasi dalam satu kelompok MPA sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) regu, masing-masing regu terdiri dari 15 (lima belas) anggota masyarakat setempat. Sehingga satu kelompok MPA paling tidak melibatkan 30 (tiga puluh) anggota masyarakat dalam satu desa.

Calon anggota MPA diwajibkan mengikuti pembekalan teknis terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang meliputi materi teori dan praktek paling sedikit selama 2 (dua) hari atau setara dengan 16 (enam belas) jam mata pelajaran. Selain materi terkait dengan pengendalian karhutla, calon anggota mendapatkan materi praktek pembuatan sekat bakar, pembuatan kompos organik dan pembuatan briket arang. Materi tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal terkait dengan pemanfaatan bahan bakaran.

Kelompok MPA bertugas ikut aktif membantu Unit Pelaksana Teknis atau Kesatuan Pengelolaan Hutan serta MA dalam melaksanakan kegiatan pencegahan, pemadaman dan penanganan paska kebakaran hutan dan lahan. Tugas tersebut merupakan salah satu kegiatan yang terdapat dalam ProKlim, yaitu pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, khususnya dalam kegiatan mitigasi. Penghargaan diberikan kepada anggota MPA yang berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan penyuluhan kepada masyarakat serta ikut aktif membantu MA dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

Kelompok MPA tersebut dapat diarahkan untuk melakukan berbagai kegiatan dalam upaya pencegahan karhutla, khususnya pemanfaatan lahan pekarangan guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan kualitas lingkungan, misalnya diversifikasi pertanian. Upaya yang dilakukan tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan. Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok MPA dalam skala desa tersebut diharapkan

dapat terdaftar juga sebagai ProKlim, dimana tidak hanya aksi mitigasi dalam upaya pencegahan karhutla, namun juga dapat dikembangkan sebagai aksi adaptasi perubahan iklim.

Manggala Agni (MA) adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang dilengkapi dengan sumberdaya manusia, dana dan sarana prasarana. Salah satu fungsi dari MA adalah menyelenggarakan pencegahan karhutla melalui koordinasi dengan para pihak, penyadartahuan dan pendampingan, peringatan dan deteksi dini, patroli pencegahan, penjagaan, pembuatan peta kerawanan kebakaran dan pengurangan resiko bahaya kebakaran. MA dibentuk oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai organisasi khusus dalam hal pengendalian kebakaran hutan dan lahan. MA tingkat pusat dipimpin oleh Direktur, sedangkan MA tingkat Daops dipimpin oleh Kepala Daops yang bertanggung jawab kepada Direktur. MA merupakan perpanjangan tangan KLHK di tingkat tapak dalam hal pengendalian karhutla.

Penyadartahuan dan pendampingan dilakukan terhadap masyarakat melalui kegiatan antara lain penyuluhan, apel siaga, kampanye, demonstrasi atau peragaan, bimbingan dan pelatihan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. MA dapat disinergikan dalam kegiatan ProKlim, khususnya dalam fungsinya pada kegiatan penyadartahuan dan pendampingan. Melalui Manggala Agni yang juga berada di bawah Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, dapat disebut sebagai duta iklim yang diharapkan dapat menyebarkan informasi terkait ProKlim di wilayah kerjanya. Wilayah kerja Daops terdapat pada daerah yang dianggap rawan karhutla. Saat ini, wilayah kerja Daops terdapat di 12 Provinsi yang tersebar dalam 37 Daops, yaitu:

1. Provinsi Sumatera Utara (3 Daops)
2. Provinsi Riau (4 Daops)
3. Provinsi Kepulauan Riau (1 Daops)
4. Provinsi Jambi (6 Daops)

5. Provinsi Sumatera Selatan (4 Daops)
6. Provinsi Kalimantan Barat (5 Daops)
7. Provinsi Kalimantan Tengah (5 Daops)
8. Provinsi Kalimantan Selatan (3 Daops)
9. Provinsi Kalimantan Timur (2 Daops)
10. Provinsi Sulawesi Selatan (2 Daops)
11. Provinsi Sulawesi Tenggara (1 Daops)
12. Provinsi Sulawesi Utara (1 Daops)

Wilayah tersebut berkontribusi terdapat peningkatan emisi GRK melalui karhutla. Adanya organisasi Daops yang berkoordinasi dengan banyak pihak, diharapkan dapat melakukan aksi mitigasi dalam hal penurunan bahkan pencegahan peningkatan emisi GRK.

Kegiatan lain dalam agenda Daops yang dapat disinergikan dengan ProKlim adalah patroli terpadu (patdu). Patroli terpadu merupakan salah satu terobosan penting yang dilaksanakan pada tahun 2016 yang melibatkan para pihak, mulai dari Manggala Agni (KLHK), TNI, POLRI, Pemerintah daerah dan masyarakat. Tim patdu mendirikan posko di desa-desa rawan karhutla dan menetap dalam beberapa hari. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi pencegahan karhutla. Pada kegiatan tersebut, diharapkan dapat memperkenalkan kegiatan ProKlim kepada masyarakat luas. Kegiatan patdu dianggap strategis dalam upaya penyebaran informasi terkait ProKlim, selain yang terlibat dalam patdu terdiri dari banyak unsur yang diharapkan dapat menyebarkan informasi melalui lisan kepada institusi atau lembaga masing-masing, keberadaan tim yang cukup lama di tengah-tengah masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup memadai terkait ProKlim.



Gambar 22. Peningkatan Kapasitas Manggala Agni untuk Mendukung Pelaksanaan ProKlim

Melalui sinergi dengan berbagai kegiatan lingkup KLHK diharapkan dapat meningkatkan penyebaran informasi terkait ProKlim ke berbagai institusi atau lembaga dan masyarakat luas.

Pengembangan lokasi ProKlim pun diharapkan dapat bersinergi dengan program strategis lain yang dikoordinasikan oleh unit kerja teknis di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti Adipura, Proper, Kalpataru serta Kementerian/Lembaga lain seperti desa tangguh bencana (BNPB), desa sehat (Kemenkes), desa wisata (Kemendes) dan sebagainya. Melalui sinergitas pada lokasi yang sama, diharapkan kegiatan adaptasi dan mitigasi dapat lebih berkembang sehingga terbentuk masyarakat berketahanan iklim yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

IV. ARAH KEBIJAKAN PENGUATAN PELAKSANAAN PROKLIM

Sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan upaya pengendalian perubahan iklim menuju pencapaian target NDC tahun 2030, telah ditetapkan kebijakan untuk meningkatkan upaya bersama adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui ProKlim sebagai pendekatan *bottom up* dalam program ketahanan iklim di tingkat lokal. Pelaksanaan ProKlim juga diarahkan untuk bersinergi dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan sekaligus menurunkan tekanan yang mengarah pada deforestasi dan degradasi hutan primer yang berkontribusi terhadap pengendalian perubahan iklim.

Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak sebagai konsep yang terintegrasi dipandang sebagai hal penting untuk membangun ketahanan dalam menjaga sumberdaya pangan, air dan energi. ProKlim diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan menuju rendah karbon dan berketahanan iklim yang konsisten dengan komitmen untuk berkontribusi dalam upaya global dalam mencapai sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).

Target yang diharapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan ProKlim sebagai gerakan nasional pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat adalah terdapatnya kegiatan ProKlim pada lebih dari 10.000 lokasi kampung iklim yang menyebar di 34 provinsi seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2030.

Pada tahap akhir road map, diharapkan setiap kabupaten/kota memiliki sedikitnya 20 lokasi ProKlim. Dengan demikian, dari 508 kabupaten/kota akan terdapat 10.000 lokasi ProKlim dengan berbagai tingkat kategori yaitu pratama, madya, utama dan lestari.

Sasaran yang diharapkan dapat tercapai di tahun 2030 melalui pelaksanaan ProKlim adalah meningkatnya jumlah lokasi kampung iklim yang warganya memiliki pemahaman mengenai perubahan iklim

dan dampaknya serta secara aktif bersama-sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan pihak pendukung lain melaksanakan kegiatan yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas adaptasi dan penurunan emisi GRK nasional.

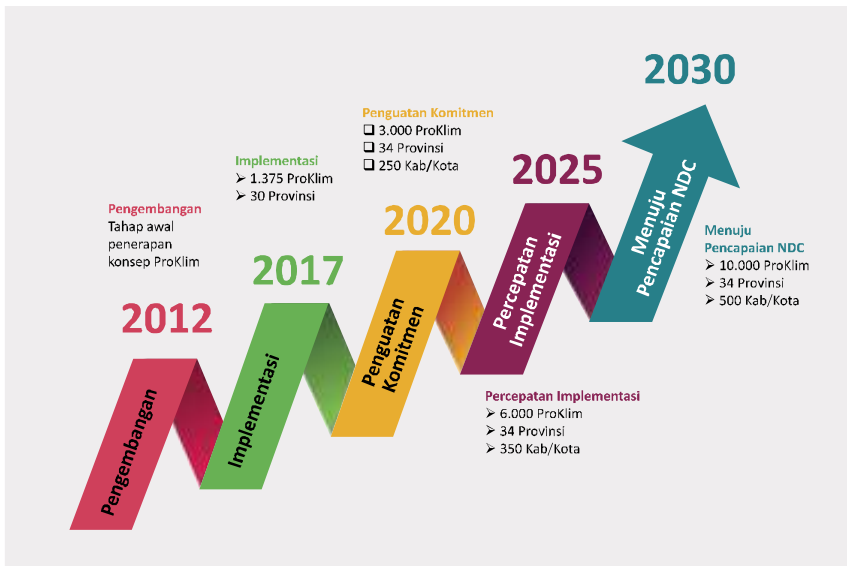
Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan ProKlim tahun 2030 adalah meliputi hal-hal berikut:

- a. Memperkuat kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak;
- b. Memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- c. Memperkuat kapasitas masyarakat dalam melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- d. Menjalinkan kemitraan dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga non-pemerintah;
- e. Mendorong terciptanya kepemimpinan di tingkat masyarakat untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- f. Menyebarkan keberhasilan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal untuk mendorong proses replikasi ProKlim;
- g. Meningkatkan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal;
- h. Mendorong komitmen pengambil kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk pengalokasian sumber daya yang memadai bagi pelaksanaan ProKlim;
- i. Mendorong optimalisasi potensi sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan Program Kampung Iklim.

Keberlanjutan ProKlim akan sangat tergantung kepada pelaksana kegiatan di lokasi yang telah ditetapkan. Kegiatan yang berkesinambungan dapat dilaksanakan dengan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat yang memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap program. Pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi

pada lokasi yang telah berhasil memperoleh apresiasi dapat menjadi contoh bagi kelompok masyarakat daerah lain sebagai pembelajaran.

Disamping itu, telah dapat dilakukan perhitungan sederhana untuk memperkirakan emisi karbon yang bisa diserap oleh masing-masing lokasi ProKlim secara mandiri. Secara sederhana, dengan terbentuknya 10.000 lokasi ProKlim maka kegiatan aksi adaptasi dan mitigasi dapat diimplementasikan secara nyata di tingkat tapak.



Gambar 23. Road Map Pencapaian Target dan Sasaran ProKlim Tahun 2030

V. PENUTUP

Road Map ProKlim diharapkan dapat menjadi acuan seluruh pihak dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk membangun ketahanan masyarakat di tingkat tapak dalam menghadapi perubahan iklim dengan target capaian yang terukur. Rencana rinci kegiatan perlu dikembangkan dengan mempertimbangkan kondisi terkini dan capaian pelaksanaan ProKlim sampai tahun 2017.

Capaian pelaksanaan ProKlim saat ini dan dukungan berbagai pihak merupakan modal kerja bagi langkah selanjutnya, untuk dapat mewujudkan target dan sasaran ProKlim sampai tahun 2030.

Peran aktif masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk membangun ketahanan nasional dalam menghadapi iklim yang berubah serta tercapainya target pengurangan emisi GRK yang telah menjadi komitmen Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016.

Dengan tersusunnya Road Map ProKlim, penguatan aksi lokal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak diharapkan dapat berjalan lebih optimal, sehingga akan memberikan manfaat positif yang nyata bagi bangsa dan negara Indonesia.

Lampiran 1

Daftar Lokasi Penerima Trophy dan Sertifikat ProKlim Tahun 2012-2017

Tahun 2012

No.	Nama Lokasi	Kabupaten	Provinsi
1	Dusun Sukunan	Sleman	DIY
2	Desa Jetis Lor	Pacitan	Jawa Timur
3	Desa Sambangan	Buleleng	Bali
4	Dukuh Gatak II	Bantul	DIY
5	Dukuh Serut	Bantul	DIY
6	Desa Mukti Jaya	Rokan Hilir	Riau
7	Desa Nglegi	Gunungkidul	DIY

Tahun 2013

No.	Nama Lokasi	Kabupaten	Provinsi
1	Dusun Sukawangi	Tasikmalaya	Jawa Barat
2	Desa Burno	Lumajang	Jawa Timur
3	Desa Gekbrong	Cianjur	Jawa Barat
4	Dusun Bendrong	Malang	Jawa Timur

Tahun 2014

No.	Nama Lokasi	Kabupaten/Kota	Provinsi
1	Dusun Kubang	Kabupaten Ciamis	Jawa Barat
2	Desa Sindanglaya	Kabupaten Ciamis	Jawa Barat
3	Desa Mekarwangi	Kabupaten Tasikmalaya	Jawa Barat
4	Desa Ngrancah	Kabupaten Magelang	Jawa Tengah
5	Desa Pagerwangi	Kabupaten Bandung Barat	Jawa Barat
6	RW 08 Merbabu Asih	Kota Cirebon	Jawa Barat
7	Desa Pasanggrahan	Kabupaten Purwakarta	Jawa Barat

Penerima Penghargaan Trophy, Sertifikat dan Insentif ProKlim Tahun 2015

No.	Nama Lokasi	Kabupaten/Kota	Provinsi
1	Desa Pelakat	Kabupaten Muara Enim	Sumatera Selatan
2	Desa Mandalamekar	Kabupaten Tasikmalaya	Jawa Barat
3	Desa Setianegara	Kabupaten Kuningan	Jawa Barat
4	Desa Tegalega	Kabupaten Cianjur	Jawa Barat
5	Desa Mendis Jaya	Kabupaten Musi Banyuasin	Sumatera Selatan
6	Desa Mendis	Kabupaten Musi Banyuasin	Sumatera Selatan
7	RW 01 Kelurahan Pulokerto	Kota Palembang	Sumatera Selatan
8	RW 09 Kelurahan Karang Tengah	Kota Sukabumi	Jawa Barat
9	Desa Bono Tapung	Kabupaten Rokan Hulu	Riau
10	RW 17 Desa Jati Endah	Kabupaten Bandung	Jawa Barat
11	Dusun III Desa Karya Mulya	Kota Prabumulih	Sumatera Selatan
12	Desa Balokang	Kota Banjar	Jawa Barat
13	Dusun Simurugul	Kabupaten Garut	Jawa Barat
14	Korong Kandang Ampek	Kabupaten Padang Pariaman	Sumatera Barat
15	Desa Ngargomulyo	Kabupaten Magelang	Jawa Tengah
16	Dusun Cisarua Desa Cipeuteuy	Kabupaten Sukabumi	Jawa Barat
17	RW 01 Kelurahan Bagan Sinembah Kota	Kabupaten Rokan Hilir	Riau
18	Kelurahan Sempidi	Kabupaten Badung	Bali
19	Dusun Parigi	Kabupaten Wajo	Sulawesi Selatan
20	Dusun Palippu	Kabupaten Wajo	Sulawesi Selatan

Penerima Penghargaan Trophy, Sertifikat dan Insentif ProKlim Tahun 2016

No.	Nama Lokasi	Kabupaten/Kota	Provinsi
1	Banjar Dinas Bukti, Desa Bukti	Kabupaten Buleleng	Bali
2	Dusun Pendulan, Desa Sumberagung	Kabupaten Sleman	Daerah Istimewa Yogyakarta
3	RW 01, Kelurahan Sunter Jaya	Kota Jakarta Utara	DKI Jakarta
4	RW 08, Kelurahan Petukangan Selatan	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta
5	Dusun Bahagia, Desa Tungkal I	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Jambi
6	Desa Mekarjaya	Kabupaten Cianjur	Jawa Barat
7	Desa Tajur	Kabupaten Bogor	Jawa Barat
8	RW 08, Kelurahan Cicurug	Kabupaten Majalengka	Jawa Barat
9	Dusun Situgede, Desa Sagalaherang	Kabupaten Ciamis	Jawa Barat
10	Kelurahan Cikundul	Kota Sukabumi	Jawa Barat
11	Dusun Madukoro 2, Desa Madukoro	Kabupaten Magelang	Jawa Tengah
12	RW 23, Kelurahan Kadapiro	Kota Surakarta	Jawa Tengah
13	Desa Pujon Kidul	Kabupaten Malang	Jawa Timur
14	Dusun Perintis, Desa Nibung	Kabupaten Sambas	Kalimantan Barat
15	Dusun Palm Agung, Kepenghuluan Balam Jaya	Kabupaten Rokan Hilir	Riau
16	Dusun Aek Mual, Kepenghuluan Balam Jaya	Kabupaten Rokan Hilir	Riau
17	Dusun Lompo, Desa Kajuara	Kabupaten Bone	Sulawesi Selatan
18	Dusun Parukku, Desa	Kabupaten Bulukumba	Sulawesi Selatan

No.	Nama Lokasi	Kabupaten/Kota	Provinsi
	Bulolohe		
19	Jorong Piruko Utara, Nagari Sitiung	Kabupaten Dharmasraya	Sumatera Barat
20	Jorong Kampung Hangus, Nagari Koto Kaciak	Kabupaten Pasaman	Sumatera Barat
21	Desa Pagar Dewa	Kabupaten Muara Enim	Sumatera Selatan
22	Desa Sari Bungamas	Kabupaten Lahat	Sumatera Selatan

Penerima Penghargaan Trophy, Sertifikat dan Insentif ProKlim Utama Tahun 2017

No.	Nama Lokasi	Kabupaten/Kota	Provinsi
1	Kampung Cipanas, Desa Kabandungan	Kabupaten Sukabumi	Jawa Barat
2	Desa Lubuk Selo	Kabupaten Lahat	Sumatera Selatan
3	Dukuh Sruni, Desa Sruni	Kabupaten Boyolali	Jawa Tengah
4	Desa Mojodeso	Kabupaten Bojonegoro	Jawa Timur
5	Desa Sidomulyo	Kabupaten Muara Enim	Sumatera Selatan
6	Desa Karangrejo	Kabupaten Magelang	Jawa Tengah
7	Desa Sambak	Kabupaten Magelang	Jawa Tengah
8	Dusun Sindangsari, Desa Kalijaya	Kabupaten Ciamis	Jawa Barat
9	RW 07, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta
10	Lembang Bua Tarrung	Kabupaten Tana Toraja	Sulawesi Selatan
11	Dusun Kaligamping, Desa Kalijaya	Kabupaten Ciamis	Jawa Barat
12	RW 03, Kelurahan Rawajati	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta
13	Kepenghuluan Pematang Sikek	Kabupaten Rokan Hilir	Riau
14	Dusun Kauman,	Kabupaten Kudus	Jawa Tengah

No.	Nama Lokasi	Kabupaten/Kota	Provinsi
	Desa Ngembalrejo		
15	Dukuh Pakis, Desa Suwawal Timur	Kabupaten Jepara	Jawa Tengah
16	RW 3, Kelurahan Jambangan	Kota Surabaya	Jawa Timur
17	Kelurahan 2 Ilir	Kota Palembang	Sumatera Selatan
18	Jorong Sungai Kalang I, Nagari Tiumang	Kabupaten Dharmasraya	Sumatera Barat
19	Dusun Kebun Kencana, Kepenghuluan Balai Jaya	Kabupaten Rokan Hilir	Riau
20	Dusun Kebun Kencana, Kepenghuluan Pasir Putih	Kabupaten Rokan Hilir	Riau
21	Dukuh Salam-Trumpon, Desa Merdikorejo	Kabupaten Sleman	DIY
22	RW 06, Kelurahan Kebon Kosong	Kota Jakarta Pusat	DKI Jakarta
23	Dusun Pegundungan, Desa Pegundungan	Kabupaten Banjarnegara	Jawa Tengah
24	Desa Salassae	Kabupaten Bulukumba	Sulawesi Selatan
25	Jorong Jirek, Nagari Andaleh	Kabupaten Tanah Datar	Sumatera Barat
26	Dusun Pasang, Desa Pasang	Kabupaten Enrekang	Sulawesi Selatan
27	Desa Rejosari	Kabupaten Malang	Jawa Timur
28	Dusun Wanue, Desa Poleonro	Kabupaten Bone	Sulawesi Selatan
29	Jorong Labu Atan, Nagari Sungai Jambu	Kabupaten Tanah Datar	Sumatera Barat
30	Dusun Sei Langer, Desa Mengkiang	Kabupaten Sanggau	Kalimantan Barat

**Daftar Pemerintah Daerah Penerima Penghargaan Pendukung ProKlim
Tahun 2016-2017**

Tahun 2016

1. Provinsi DKI Jakarta
2. Provinsi Jawa Barat
3. Kota Banjarbaru
4. Kota Kotamobagu

Tahun 2017

1. Provinsi Banten
2. Provinsi Riau
3. Provinsi Sumatera Selatan
4. Provinsi Jawa Tengah
5. Provinsi Jawa Timur
6. Kota Palembang
7. Kota Jakarta Utara
8. Kabupaten Dharmasraya
9. Kabupaten Solok
10. Kabupaten Bone